



**RENJA
2024**



RENCANA KERJA Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2024



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KETAPANG**

 (0534) 32253

 dinkes@ketapangkab.go.id

 Jl. D.I. Panjaitan No. 40 Kodepos 78851

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2024 ini dapat di selesaikan.

Penyusunan Renja dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan guna menjaga konsistensi dan sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat dengan optimal mendukung proses pembangunan Kabupaten Ketapang. Pemahaman yang cermat terhadap program strategis Pemerintah Kabupaten Ketapang maupun langkah yang diperlukan, akan menghasilkan Renja yang bukan saja akan lebih berkualitas dan implementatif, tetapi lebih jauh lagi akan bermanfaat penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang disusun agar dapat dijadikan pedoman untuk Bidang dan Sub Bagian di lingkungan Dinas Kesehatan agar kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar mengarah pada pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Ketapang, September 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Ketapang,



PERANG KOWIRA, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19730507 200212 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	4
C. Maksud dan Tujuan	10
D. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KAB KETAPANG	12
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan	12
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	22
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	24
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	34
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	34
B. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan	38
C. Program dan Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	63
BAB V PENUTUP	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Ketapang
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang
Tabel 2.3	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan
Tabel 2.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Ketapang
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Ketapang
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Ketapang
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kementerian Kesehatan
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang
Tabel 3.3	Hasil mapping fokus kegiatan terhadap Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
Tabel 3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Ketapang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 tahun 2004. Pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan *concurrent* (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Selain dari itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 dan Permenkes Nomor 4 tahun 2019 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Kabupaten Ketapang terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Ketapang adalah $\pm 31.588 \text{ km}^2$ atau 21,3 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan masih merupakan Kabupaten terluas di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang terdiri atas 20 Kecamatan dengan 9 Kelurahan dan 253 Desa.

Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Kendawangan dengan luas wilayah $\pm 5.859 \text{ km}^2$ atau 18,55% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Ketapang, sedangkan Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Delta Pawan yaitu $\pm 74 \text{ km}^2$ atau 0,23% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Ketapang.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang periode 2021-2026 adalah **"Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Yang Sejahtera"**. Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan kedalam enam misi. Dinas Kesehatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan Kesehatan di suatu Wilayah. Sehingga terkait dengan Visi dan Misi diatas, Dinas Kesehatan mempunyai tujuan dari misi ketiga yaitu: **"Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing"**. Selain dari itu, dalam menjalankan kepemimpinannya Bupati dan Wakil Bupati Ketapang memiliki program prioritas yang tertuang didalam lima panca karya. Dinas kesehatan melaksanakan panca karya **"Ketapang Sehat"** yang merupakan panca karya yang pertama.

Secara umum pembangunan kesehatan di Kabupaten Ketapang telah menunjukkan berbagai kemajuan penting dalam meningkatkan status kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) orang di Kabupaten Ketapang telah naik mengikuti tren kenaikan AHH global. Pada tahun 2021 AHH orang Ketapang sebesar 71.11 dan naik menjadi 71.27 pada tahun 2022. Pendekatan terbaru tidak semata-mata untuk melihat tahun hidup (AHH), namun yang lebih penting adalah tahun hidup berkualitas (*Healthy Adjusted Life Expectancy/HALE*). HALE orang Indonesia secara rerata adalah 62,65 tahun, artinya jika di kaitkan dengan AHH orang di Kabupaten Ketapang, maka terdapat 8,62 tahun yang hilang karena kualitas hidup yang buruk akibat menderita penyakit dan disabilitas. Dalam membangun SDM yang berkualitas, selisih angka inilah yang harus diperkecil.

Permasalahan lain yang ada di Kabupaten Ketapang yakni masih terdapat kecenderungan naik turun untuk Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). *Prevalensi stunting* pada balita sudah cenderung menurun namun penurunan *prevalensi stunting* belum terlihat secara *signifikan*. Selain dari itu, jika dilihat dari beban penyakit di Kabupaten Ketapang mengalami beban ganda, di satu sisi Penyakit Tidak Menular (PTM) naik dengan *signifikan*, namun masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas.

Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko penyakit *zoonosis* (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (*new emerging diseases*). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit yang baru muncul, khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang baru adalah penyakit *zoonosis*, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya. Melihat tingginya mobilisasi keluar masuk tenaga kerja asing yang berasal dari luar negeri dan terbukanya transportasi di Kabupaten Ketapang berpotensi masuknya agen penyakit baru.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pelaksanaan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan melalui perencanaan dan penganggaran yang terpadu, terarah dan sistematis. Perencanaan pembangunan bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021–2026 dan dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2023 yang diperoleh melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan dilakukan mulai pada tingkat Desa/ Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten serta memperhatikan hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musrenbang Tingkat Provinsi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan merupakan dokumen awal perencanaan pembangunan kesehatan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Dokumen ini memuat kerangka program, kegiatan dan pendanaannya. Dengan tersusunnya rencana kerja tahunan ini diharapkan menjadi arah pembangunan bidang kesehatan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tahun 2024 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 44);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52);
37. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95);
39. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 42);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. menyediakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan kesehatan di Kabupaten Ketapang yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan;
- b. terselenggaranya pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang (tahun 2023).

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. mendiskripsikan program-program yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang;
- b. menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan;
- c. menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan;
- d. meningkatkan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan dalam rangka mendukung perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat;
- e. menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Renja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kesehatan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Review Terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan, dan Penelaahan Usulan Program Masyarakat.
- BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan menguraikan Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan serta Program dan Kegiatan dari Dinas Kesehatan.
- BAB IV Penutup, menguraikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan

Kegiatan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.

Hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat diketahui berdasarkan laporan hasil kinerja dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran yang telah dicapai atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penetapan kebijakan pembangunan di Kabupaten Ketapang didasarkan kepada analisis berbagai potensi yang dimiliki dan kendala yang dihadapi, serta kebijakan pembangunan nasional bidang kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel Tabel 2.1 (T-C.29) di bawah ini:

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Ketapang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02	URUSAN WAJIB KESEHATAN						55.33			90.00
1.02.01	DINAS KESEHATAN						55.33			90.00
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						65.81			
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	95 persen		80 persen	70 persen	25.51	90 persen	80 persen	90.00
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen		8 dokumen	8 dokumen	25.51	8 dokumen	8 dokumen	90.00
1 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	90.00
1 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	90.00
1 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	90.00
1 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	90.00
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan		6 laporan	6 laporan		6 laporan	6 laporan	90.00
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan		1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	90.00

1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 persen	-	100 persen	100 persen	81.15	100 persen	100 persen	90.00
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- orang / bulan		- orang / bulan	- orang / bulan	81.16	- orang / bulan	- orang / bulan	100.00
1 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- dokumen		- dokumen	- dokumen	91.14	- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- dokumen		- dokumen	- dokumen		- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- laporan		- laporan	- laporan	39.62	- laporan	- laporan	90.00
1 02 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	- dokumen		- dokumen	- dokumen		- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- laporan		- laporan	- laporan	85.38	- laporan	- laporan	90.00
1 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- dokumen		- dokumen	- dokumen		- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	95 persen		85 persen	80 persen		90 persen	85 persen	90.00
1 02 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	90.00
1 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket		- paket	- paket		- paket	- paket	90.00
1 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen		- dokumen	- dokumen		- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20 dokumen		- dokumen	- dokumen		- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20 dokumen		- dokumen	- dokumen		- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	20 orang		- orang	- orang		- orang	- orang	90.00
1 02 01 2.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	20 laporan		- laporan	- laporan		- laporan	- laporan	90.00
1 02 01 2.05 08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	25 orang		- orang	- orang		- orang	- orang	90.00
1 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang		- orang	- orang		- orang	- orang	90.00
1 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang		- orang	- orang		- orang	- orang	90.00
1 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang		- orang	- orang		- orang	- orang	90.00
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	95 persen		80 persen	70 persen	84.17	90 persen	80 persen	90.00
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket		- paket	- paket		- paket	- paket	90.00

1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket		- paket	- paket		- paket	- paket	90.00
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket		- paket	- paket	80.27	- paket	- paket	90.00
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket		- paket	- paket	100.00	- paket	- paket	90.00
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen		- dokumen	- dokumen	45.00	- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket		- paket	- paket		- paket	- paket	90.00
1 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 laporan		- laporan	- laporan		- laporan	- laporan	90.00
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan		- laporan	- laporan	98.79	- laporan	- laporan	90.00
1 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen		- dokumen	- dokumen		- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen		- dokumen	- dokumen		- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	95 persen	-	80 persen	70 persen	78.85	90 persen	80 persen	90.00
1 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	90.00
1 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	90.00
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket		- paket	- paket	69.07	- paket	- paket	90.00
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	95 persen	-	80 persen	70 persen	78.66	90 persen	80 persen	90.00
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan		- laporan	- laporan	67.96	- laporan	- laporan	90.00
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan		1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	90.00
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan		- laporan	- laporan		- laporan	- laporan	90.00
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		- laporan	- laporan		- laporan	- laporan	90.00
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	95 persen	-	80 persen	70 persen	45.74	90 persen	80 persen	90.00
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	165 unit		- unit	- unit	74.60	- unit	- unit	90.00
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit		- unit	- unit	67.46	- unit	- unit	90.00
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	90.00

1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD yang terpenuhi	95 persen	-	80 persen	70 persen	95 persen	90 persen	80 persen	95.00
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	24 unit kerja		24 unit kerja	24 unit kerja	24 unit kerja	24 unit kerja	24 unit kerja	95.00
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-						90.00
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi	95 persen	-	85 persen	80 persen	26.22	90 persen	85 persen	90.00
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	- Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	- Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	15 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	
1 02 02 2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	- Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	- Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	22 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	- Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	57 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	
1 02 02 2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	7 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	14 unit		30 unit	30 unit		9 unit	9 unit	90.00
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	- Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	- unit	- unit	- unit	- unit	99.38	- unit	- unit	90.00
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	- Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	- paket	- paket	- paket	- paket	23.65	- paket	- paket	90.00

1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	- Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	- paket	- paket	- paket	- paket	81.41	- paket	- paket	90.00
1 02 02 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	3 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	3 unit		- unit	- unit		- unit	- unit	
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	170 unit	- unit	- unit	- unit		10 unit	10 unit	90.00
1 02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen		- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	100 persen	-	95 persen	90 persen	44.47	100 persen	95 persen	90.00
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12.383 orang	9.181 orang	11.258 orang	6.174 orang	39.29	11.820 orang	9.456 orang	90.00
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	- Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.818 Ibu Bersalin	5.473 Ibu Bersalin	10.744 Ibu Bersalin	4.309 Ibu Bersalin	34.71	11.281 Ibu Bersalin	6.769 Ibu Bersalin	90.00
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	- Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.256 Orang	7.107 Orang	10.233 Orang	5.056 Orang	47.88	10.744 Orang	7.521 Orang	90.00
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	- Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40.390 balita	11.769 balita	36.719 balita	8.858 balita	61.98	38.555 balita	11.567 balita	90.00
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	- Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98.912 orang	6.196 orang	89.920 orang	1.682 orang	34.41	94.416 orang	28.325 orang	90.00
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	- Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49.636 orang	25.537 orang	45.124 orang	9.103 orang	26.52	47.380 orang	14.214 orang	90.00
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	- Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- orang	- orang	- orang	- orang	43.58	- orang	- orang	90.00
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	- Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- orang	- orang	- orang	- orang	61.42	- orang	- orang	90.00
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 dokumen	-	-	-		1 dokumen	1 dokumen	90.00
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	14.48	1 dokumen	1 dokumen	90.00
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	90.00
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	90.00

1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	99.97	1 dokumen	1 dokumen	90.00
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	- dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	99.99	- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	52.66	1 dokumen	1 dokumen	90.00
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	39.41	- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	69.63	36 dokumen	36 dokumen	90.00
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	- paket	- paket	- paket	- paket		- paket	- paket	90.00
1 02 02 2.02 30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	32.38	9 unit	9 unit	90.00
1 02 02 2.02 31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	33.33	1 dokumen	1 dokumen	90.00
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 dokumen	-	-	-		1 dokumen	1 dokumen	90.00
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	-	-	-		- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	3.59	- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	- unit	- unit	- unit	- unit	19.56	- unit	- unit	90.00
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	- Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	-	1 unit	1 unit	34.74	1 unit	1 unit	90.00
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	- Angka keberhasilan pengobatan (success rate TB)	90	72.20	80	70		90	90	90.00
1 02 02 2.02 41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	- Cakupan ODHIP on ART	50	41.00	50	40		70	70	90.00
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	- Jumlah Puskesmas melaksanakan Surveilans Vektor	24	-	0	12		24	24	90.00
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terlaksana	100 persen	-	90 persen	85 persen	55.86	95 persen	90 persen	90.00
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 dokumen		- dokumen	- dokumen	55.86	- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	90.00
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	- Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	6 unit		2 unit	2 unit		- unit	- unit	90.00
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin RS Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota yang terlaksana	100 persen	-	90 persen	85 persen	56.42	95 persen	90 persen	90.00

1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	- Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	20.06	4 unit	4 unit	90.00
1 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	4 unit	-	-	-		4 unit	4 unit	90.00
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	26 unit	- unit	- unit	- unit		- unit	- unit	90.00
1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	- Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	90.88	24 dokumen	24 dokumen	90.00
										90.00
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-			83.95			90.00
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota yang terlaksana	90 persen	-	80 persen	75 persen	74.37	85 persen	80 persen	90.00
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian PerizinanPraktik Tenaga Kesehatan	- dokumen		- dokumen	- dokumen		- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta TindakLanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	- dokumen		- dokumen	- dokumen	74.37	- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota yang terpenuhi	85 persen	-	80 persen	80 persen	84.45	85 persen	80 persen	90.00
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber DayaManusia Kesehatan	1 dokumen		- dokumen	- dokumen	92.71	- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1.037 orang		- orang	- orang	84.42	- orang	- orang	90.00
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- dokumen		- dokumen	- dokumen		- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	85 persen	-	75 persen	70 persen	52.83	80 persen	75 persen	90.00
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250 orang		200 orang	137 orang	52.83	250 orang	250 orang	90.00
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						43.48			90.00

1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang terlaksana	95 persen	-	85 persen	80 persen	48.62	90 persen	85 persen	90.00
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	37.57	- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- sarana	- sarana	- sarana	- sarana	31.54	- sarana	- sarana	90.00
1 02 04 2.01 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	- sarana	- sarana	- sarana	- sarana	98.07	- sarana	- sarana	90.00
1 02 04 2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapat Sertifikat Produksi	95 persen		85 persen	80 persen		90 persen	85 persen	90.00
1 02 04 2.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	- Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan RumahTangga	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen		1 dokumen	1 dokumen	90.00
1 02 04 2.02 02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen		- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang terpenuhi	95 persen	- dokumen	85 persen	80 persen	61.82	90 persen	85 persen	90.00
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	61.82	- dokumen	- dokumen	90.00

1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang terpenuhi	95 persen	- unit	85 persen	80 persen	33.35	90 persen	85 persen	90.00
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	- unit	- unit	- unit	- unit	33.35	- unit	- unit	90.00
1 02 04 2.06 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen		- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						49.10			90.00
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kesehatan masyarakat	75 persen	- dokumen	65 persen	60 persen	81.97	70 persen	65 persen	90.00
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	- dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	81.97	- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Promotif Preventif dalam rangka pelaksanaan sehat TK Daerah Kab/Kota yang terlaksana	75 persen		65 persen		73.91	70 persen	65 persen	90.00
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	- dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	73.91	- dokumen	- dokumen	90.00
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	75 persen		65 persen		41.91	70 persen	65 persen	90.00
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	- dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	41.91	- dokumen	- dokumen	90.00

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Capaian pembangunan di Kabupaten Ketapang pada urusan kesehatan dapat dilihat melalui peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Ketapang pada tahun 2021 sebesar 71.11 menjadi 71.27 pada tahun 2022. Meskipun demikian, AHH Kabupaten Ketapang lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH Indonesia pada tahun 2022 yaitu sebesar 73.60. Hal tersebut mengindikasikan masih belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ketapang.

Selain dari itu, berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan terdapat 12 Indikator jenis layanan yang harus dipenuhi. Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan. Dimana capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (*seratus persen*). Saat ini di Kabupaten Ketapang belum ada indikator kinerja SPM yang mencapai target.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Ketapang, Dinas Kesehatan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan. Sasaran Strategis Dinas Kesehatan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan. IKU Dinas Kesehatan dilakukan perjanjian kinerja antara Kepala Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan. Berdasarkan target Renstra Tahun 2021-2026 terdapat 8 (delapan) IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Dimana pencapaian pada tahun 2022 hanya terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target. Hasil Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada tabel 2.2 (T-C.30) di bawah ini:

Tabel 2.2 (T-C.30)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Ketapang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77%	42%	100%	100%
2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69%	20%	100%	100%	
3	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	33%	100%	100%	
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32%	17%	100%	100%	
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8%	3%	100%	100%	
6	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13%	13%	100%	100%	
7	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	8%	100%	100%	
8	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13%	8%	100%	100%	
9	Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	58%	59%	100%	100%	
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	84%	100%	100%	
11	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	43%	100%	100%	
12	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	49%	100%	100%	
13	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	-	230	245	230	210	183	180	175	229	140	210	183	
14	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	-	20.6	19	18	17	16	15	14	9.9	9.2	17	16	
15	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	-	-	19.5	18.5	17.5	16.5	15.5	14.5	10.3	9.6	17.5	16.5	
16	Prevalensi stunting pada balita	-	27.1	21.1	18.4	16	14	13	12	16.52	20.34	16	14	
17	Insidensi rate kasus DBD per 100.000 penduduk	-	< 49	49	49	49	49	49	49	2.47	5.86	49	49	
18	Prevalensi Hipertensi	-	-	24	21	19	17	16	15	14.1	5.02	19	17	
19	Zonasi pemetaan kasus Covid-19	-	-	Kuning	Kuning	Kuning	Hijau	Hijau	Hijau	Kuning	Kuning	Kuning	Hijau	
20	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	-	100%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	80%	90%	95%	100%	

Keterangan :

Berdasarkan Data Triwulan ke 3 (tiga) bulan September 2022

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Analisis isu-isu merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan *akseptabilitas* prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu penting terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan diantaranya peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan *stunting*, pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan, Integrasi kepesertaan JKN, Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta pemulihan dampak kesehatan Pasca Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Isu-isu penting dirumuskan dalam hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan. Secara rinci pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan kesehatan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Rendahnya kualitas kesehatan ibu	Rendahnya cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan
		Rendahnya cakupan kunjungan K1
		Rendahnya cakupan kunjungan K4
	Rendahnya kualitas kesehatan bayi	Tingginya persentase bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
		Rendahnya cakupan Kunjungan Neonatal (KN) 1
		Rendahnya cakupan Kunjungan Neonatal (KN) 3
	Rendahnya kualitas kesehatan balita	Rendahnya cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
		Tingginya persentase balita gizi buruk
	Tingginya prevalensi stunting	Tingginya persentase balita gizi kurang
		Tingginya persentase ibu hamil yang Kekurangan Energi Kronik (KEK)
		Rendahnya persentase Desa yang melaksanakan STBM
	Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	Kurangnya penerapan PHBS
		Tingginya angka kesakitan penyakit menular
		Tingginya kesakitan penyakit tidak menular
Masih tingginya kasus COVID-19	Rendahnya cakupan masyarakat yang memiliki sistem jaminan kesehatan	
	Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan jiwa	
	Rendahnya edukasi terkait pencegahan COVID-19 kepada masyarakat	
	Rendahnya penegakan disiplin terkait protokol kesehatan (prokes) COVID-19	
	Rendahnya rasio test dan tracing Covid-19	
	Rendahnya frekuensi update dan release data COVID-19 per minggu	
	Minimnya ruang isolator di RSUD dr. Agoesdjani	
Minimnya pembaruan dan publikasi data COVID-19		
Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan	Rendahnya SDM Kesehatan pada fasilitas kesehatan	
	Masih adanya fasilitas kesehatan yang tidak memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial	
	Rendahnya persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	
	Rendahnya persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Fasilitas Kesehatan sesuai dengan Standar Kemenkes	

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dijabarkan seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Ketapang

No	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Rendahnya kualitas kesehatan ibu	<ul style="list-style-type: none"> - Luasnya wilayah Kabupaten Ketapang - Sarana Prasarana layanan kesehatan belum memadai dan masih ada Desa belum memiliki Poskesdes atau Bidan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Kesehatan di Kabupaten Ketapang
2	Rendahnya kualitas kesehatan bayi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah, jenis dan distribusi SDM Kesehatan belum merata - Alur Sistem rujukan masih belum sesuai karena terhambat oleh infrastruktur yang kurang mendukung 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan DAK Fisik dan Non Fisik dalam upaya penurunan AKI dan AKB - Meningkatnya upaya pihak swasta dalam upaya pemberian layanan kesehatan melalui penderian Klinik Swasta Perusahaan
3	Rendahnya kualitas kesehatan balita	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan Kesehatan masih kurang - <i>Policy/ Regulasi</i> masih kurang - Koordinasi lintas program belum terpadu - Adat istiadat yang memberi pengaruh <i>negative</i> pada perilaku masyarakat 	
4	Tingginya <i>prevalensi stunting</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum pernah dilakukan kajian faktor risiko kejadian stunting di Ketapang sehingga saat ini belum diketahui secara pasti faktor penyebab utama kejadian stunting di Ketapang - Belum adanya regulasi pada tingkat daerah yang mendukung upaya penanggulangan stunting - Koordinasi lintas program belum terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan DAK Fisik dan Non Fisik dalam upaya penanggulangan Stunting

No	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
5	Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan lingkungan yang begitu pesat yang dapat memunculkan <i>re emerging diseases</i> - Policy/Regulasi masih kurang - Jaminan kesehatan belum menjadi kebutuhan bagi masyarakat - Masih banyak penduduk yang tidak memiliki persyaratan untuk didaftarkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) - Belum tersedianya Tenaga Dokter Spesialis Jiwa di tingkat Kabupaten dan tenaga perawat jiwa di Puskesmas - Belum ada Puskesmas Rawat Jiwa di Tingkat Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi pelaksanaan program semakin berkembang sehingga memunculkan tools baru yang memudahkan pelaksanaan program - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program-program kesehatan dengan adanya kader kesehatan di setiap Kelurahan/Desa - Jumlah sebaran Posbindu yang semakin meningkat - Dukungan lintas sektor untuk pelaksanaan program dan peluang integrasi dengan program lain
6	Masih tingginya kasus COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya mobilisasi masyarakat - Adanya tenaga kerja asing mobilisasi yang keluar masuk ke Kabupaten Ketapang - Adanya potensi masuknya penyakit dari luar karena akses transportasi dari luar yang mudah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - Dukungan lintas sector sudah mulai berjalan baik
7	Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan akreditasi pada Puskesmas - Keterbatasan SDM sebagai tim pendamping Akreditasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya tuntutan jaminan mutu pelayanan kesehatan oleh masyarakat - Permenkes nomor tentang 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri dokter dan Tempat Praktek Mandiri dokter gigi - Permenkes Nomor 99 tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenkes N0mor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

2. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan

Globalisasi merupakan tantangan maupun ancaman bagi kesehatan masyarakat. Perlu kesiapan tenaga kesehatan khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat untuk menghadapi tantangan globalisasi (MEA).

Salah satu peluang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ketapang, yakni saat ini terdapat sebanyak 74 perusahaan perkebunan yang tersebar di 18 Kecamatan. Hal ini dapat dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan program kesehatan secara terintegrasi yang melibatkan dunia usaha berupa peningkatan pemberdayaan sosial dan lingkungan perusahaan di bidang kesehatan. Sudah terdapat Peraturan bersifat operasional dan mengatur secara spesifik fungsi dan peran pihak perusahaan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Ketapang hingga pada tingkat Kecamatan dan Desa. Dengan meningkatnya peran pihak perusahaan diharapkan akan terjadi keterpaduan, koordinasi dan kerjasama sektoral yang lebih intens dalam pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ketapang.

3. Formulasi isu-isu penting

Hasil analisis perkembangan dan masalah kesehatan selanjutnya dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang adalah **“Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari hasil rewiu terhadap rancangan awal RKPD untuk OPD Dinas Kesehatan diketahui bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD sehingga telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. Secara rinci rewiu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Ketapang untuk Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.5 (T-C.31) di bawah ini :

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Ketapang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				440,846,952,800.70	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				257,500,000,000.00	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				140,451,819,848.70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				139,401,819,851.00	
		Dinas Kesehatan	- Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	BB			Dinas Kesehatan	- Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	BB		
		Dinas Kesehatan	- Nilai IKM Dinas Kesehatan	B			Dinas Kesehatan	- Nilai IKM Dinas Kesehatan	B		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				269,601,355,261.00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				88,254,402,458.00	
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan	80%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan	80%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan kunjungan K1	95%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan kunjungan K1	95%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan kunjungan K4	82%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan kunjungan K4	82%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	4.40%			Dinas Kesehatan	- Persentase penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	4.40%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan Kunjungan Neonatal (KN) KN 1	98.40%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan Kunjungan Neonatal (KN) KN 1	98.40%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan Kunjungan Neonatal (KN) KN 3	92%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan Kunjungan Neonatal (KN) KN 3	92%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan bayi mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	84%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan bayi mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	84%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase penurunan balita gizi buruk	0.20%			Dinas Kesehatan	- Persentase penurunan balita gizi buruk	0.20%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase penurunan ibu hamil yang kekurangan energi kronik (KEK)	11.50%			Dinas Kesehatan	- Persentase penurunan ibu hamil yang kekurangan energi kronik (KEK)	11.50%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase penurunan gizi balita kurang	7.30%			Dinas Kesehatan	- Persentase penurunan gizi balita kurang	7.30%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan Desa STBM	67.50%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan Desa STBM	67.50%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan penerapan PHBS	88%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan penerapan PHBS	88%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan pengetahuan tentang PHBS	88%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan pengetahuan tentang PHBS	88%		
		Dinas Kesehatan	- Incidence rate penyakit HIV/AIDS per 1.000 penduduk	0.02%			Dinas Kesehatan	- Incidence rate penyakit HIV/AIDS per 1.000 penduduk	0.02%		
		Dinas Kesehatan	- Case Notification Rate penyakit TB Paru per 100.000 penduduk	97%			Dinas Kesehatan	- Case Notification Rate penyakit TB Paru per 100.000 penduduk	97%		
		Dinas Kesehatan	- Prevalensi penyakit Diabetes	65%			Dinas Kesehatan	- Prevalensi penyakit Diabetes	65%		

		Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan masyarakat yang memiliki sistem jaminan kesehatan	88%			Dinas Kesehatan	- Persentase peningkatan cakupan masyarakat yang memiliki sistem jaminan kesehatan	88%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan	70%			Dinas Kesehatan	- Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan	70%		
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				28,513,435,691.00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				27,513,435,691.00	
		Dinas Kesehatan	- Persentase Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	85%			Dinas Kesehatan	- Persentase Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	85%		
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				1,420,000,000.00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				1,420,000,000.00	
		Dinas Kesehatan	- Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial	90%			Dinas Kesehatan	- Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial	90%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	90%			Dinas Kesehatan	- Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	90%		
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				860,342,000.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				910,342,000.00	
		Dinas Kesehatan	- Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait pencegahan dan penanggulangan COVID-19	58%			Dinas Kesehatan	- Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait pencegahan dan penanggulangan COVID-19	58%		
		Dinas Kesehatan	- Persentase kasus pelanggaran disiplin protokol kesehatan yang diberikan sanksi administratif	58%			Dinas Kesehatan	- Persentase kasus pelanggaran disiplin protokol kesehatan yang diberikan sanksi administratif	58%		

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat Kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan, Rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan kesehatan sepanjang anggaran mampu mengakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan. Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang Kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, seperti tersaji dalam Tabel 2.6. (T-C.32) di bawah ini.

Tabel 2.6 (T-C.32)

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Ketapang**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

No	Usulan Desa / Kelurahan & Kecamatan	Lokasi
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Tumbang Titi Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Bayun Sari Jl. Selangking, Rt/Rw. 002/001, Dusun Merumbuk, Desa Bayun Sari
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Keramat Jaya Jl. H.Rajali RT 002 RW 001 Dusun Pantai Utama
4	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Air Dekakah Dusun cahay baru desa air dekah
5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Suka Harapan Dusun Singa Raja Rt 005
6	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Merawa Dusun Mengkaka
7	Pembangunan Puskesmas sesuai standar nasional	Cegolak Dusun Selupuk
8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Biku Sarana Dusun Pering Kunyit
9	Pengembangan Puskesmas	Banda Sari Dusun Wana Raharja RT/RW 006/002 Desa Banda Sari
10	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai	Kualan Hulu RT 002 Dusun Botong Kirir Desa Kualan Hulu
11	Pembangunan Puskesmas sesuai standar nasional	Labai Hilir Dusun Labai hilir
12	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Labai Hilir Desa Labai Hilir
13	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pasir Mayang Desa Pasir Mayang
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pasir Mayang Desa Pasir Mayang
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pasir Mayang Desa Pasir Mayang
16	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Pemuatan Jaya Desa Pemuatan Jaya
17	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Siantau Raya Dusun sei pandan
18	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Istana Dusun Taruna Desa Istana
19	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tanjung Maju Dusun Serogi Hilir Rt.001/Rw.001 Desa Taniung Maju
20	Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Tumbang Titi Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pasir Mayang Desa Pasir Mayang
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pasir Mayang Desa Pasir Mayang
23	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Pemuatan Jaya Desa Pemuatan Jaya
24	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Siantau Raya Dusun sei pandan
25	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Istana Dusun Taruna Desa Istana
26	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tanjung Maju Dusun Serogi Hilir Rt.001/Rw.001 Desa Taniung Maju

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan juga Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Visi Kementerian Kesehatan mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada tiga pilar pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter.

Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Dimana Kementerian Kesehatan melaksanakan misi yang ke satu yakni “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” dan misi kedua yakni “Penguatan Struktur Ekonomi

yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Secara rinci Misi Presiden terkait kesehatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality rate)

Merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka *stunting* pada balita

Proporsi balita *stunting* sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan *stunting* sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment*).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar,

pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Untuk mencapai Visi dan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Kementerian Kesehatan menetapkan delapan Sasaran Strategis dalam rangka mencapai lima Tujuan Strategis. Matrik Tujuan dan Sasaran Kementerian Kesehatan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kementerian Kesehatan

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
1	2	3
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	- Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	- Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	- Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	- Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan - Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar - Terjaminnya pembiayaan kesehatan
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	- Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih - Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Dalam rangka perumusan kebijakan kesehatan, setiap tahunnya Kementerian Kesehatan melakukan rapat kerja tahunan atau Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas). Outcome RPJMN bidang Kesehatan mempunyai visi yang sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan yaitu dengan :

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
3. Memperbaiki pengendalian penyakit
4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
5. Memperkuat sistem kesehatan & pengendalian obat dan makanan

Pada Rakerkesnas Tahun 2023 Kementerian Kesehatan berkomitmen melakukan Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia pada 6 (enam) Pilar Transformasi penopang Sistem Kesehatan Indonesia yaitu :

1. Transformasi Layanan Primer
 - a. Edukasi Penduduk ; penduduk Penguatan peran kader, kampanye, dan membangun gerakan, melalui platform digital dan tokoh masyarakat
 - b. Pencegahan Primer ; Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia.
 - c. Pencegahan Sekunder ; Screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, screening stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi.
 - d. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Layanan Primer ; Revitalisasi jejaring dan standardisasi layanan Puskesmas, Posyandu, Labkesmas & kunjungan rumah
2. Transformasi Layanan Rujukan ; Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder & tersier dengan Pengembangan jejaring layanan penyakit prioritas, perbaikan tata kelola RS pemerintah.
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan

- a. Meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan ; Produksi dalam negeri 14 antigen vaksin imunisasi rutin, top 10 bahan baku obat, top 10 alkes by volume & by value.
 - b. Memperkuat ketahanan tanggap darurat ; Tenaga cadangan tanggap darurat, table top exercise kesiapsiagaan krisis.
4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan ; Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien.
 5. Transformasi SDM Kesehatan ; Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri.
 6. Transformasi Teknologi Kesehatan ; Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan berupa Teknologi Informasi dan Bioteknologi.

Untuk Sinergisitas Perencanaan antara Pusat dan Daerah, Dinas Kesehatan dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja di Kabupaten Ketapang mempedomani Renstra yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Selain dari itu Dinas Kesehatan juga mengikuti strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ketapang yang menekankan pada perubahan (*transformasi*) dan percepatan (*akselerasi*) dengan prioritas pada misi ke-3 yaitu **“Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing”**.

B. Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan

1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan target kualitatif, sehingga pencapaian terget merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan. Dengan adanya

pernyataan tujuan, maka akan jelas mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa yang akan datang.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan *benefits* atau *impacts* dari suatu kegiatan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi. Adapun tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang adalah **“meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”**, dengan indikator tujuan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari kondisi awal 71.10 menjadi 71.56 tahun di masa akhir yakni tahun 2026.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan startegis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, rasional/dapat dicapai berdasarkan kemampuan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki, berorientasi hasil dan dapat dicapai pada periode waktu tertentu.

Penentuan sasaran Dinas Kesehatan untuk Rencana Kerja tahun 2024 mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021 – 2026 yang dipadukan dengan kondisi saat ini. Sasaran Dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun periode 2021 – 2026 disertai dengan indikator kerja sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dan dijadikan tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi Bupati Ketapang. Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menetapkan sasaran yakni:

- a. meningkatnya kualitas kesehatan ibu
- b. meningkatnya kualitas kesehatan bayi
- c. meningkatnya kualitas kesehatan balita
- d. menurunnya *prevalensi stunting*

- e. meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
- f. menurunnya kasus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- g. meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

Secara rinci rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang seperti pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan ibu	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	183
		Meningkatnya kualitas kesehatan bayi	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	16
		Meningkatnya kualitas kesehatan balita	Angka kematian balita (per 1000 balita)	16.5
		Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting pada balita	14
		Meningkatnya kualitas kesehatan	<i>Insidence Rate</i> kasus DBD	49
			<i>Prevalensi</i> hipertensi	17
		Menurunnya kasus Covid-19	Zonasi pemetaan kasus Covid-19	Hijau
		Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	100%

C. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, penentuan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam menjalankan kepemimpinannya, Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2021-2026 memiliki program prioritas yang tertuang didalam lima panca karya. Dimana Panca Karya tersebut difokuskan pada upaya pencapaian: a) Ketapang Sehat, b) Ketapang Cerdas, c) Ketapang Nyaman, d) Ketapang Peduli dan e) Ketapang Sejahtera.

Sesuai dengan tugasnya yaitu membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan, Dinas kesehatan melaksanakan panca karya “ketapang sehat”, yang merupakan panca karya yang pertama. Terdapat lima fokus penting dalam rangka implementasi panca karya Ketapang Sehat diantaranya:

1. Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya);
2. Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penyakit menular dan penyakit tidak menular;
3. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan termasuk obat, vaksin, dan alat penunjang medis lainnya;

4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) bidang kesehatan;
5. Pemerataan penempatan tenaga kesehatan diseluruh wilayah kabupaten ketapang.

Dalam upaya pelaksanaan Panca Karya Ketapang sehat sehingga dapat dimunculkan kerangka pembiayaan, Fokus kegiatan tersebut perlu dilakukan *mapping* kedalam Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hasil mapping fokus kegiatan terhadap Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Hasil mapping fokus kegiatan terhadap Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Fokus	Program dalam Kepmendagri 050-5889
1	2	3
1	Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya)	- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2	Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penyakit menular dan penyakit tidak menular	- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat - Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
3	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan termasuk obat, vaksin, dan alat penunjang medis lainnya	- Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman - Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
4	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) bidang kesehatan	- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
5	Pemerataan penempatan tenaga kesehatan diseluruh wilayah kabupaten ketapang	- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang merupakan program prioritas yang termuat didalam RPJMD Kabupaten Ketapang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan tahun 2021 – 2026 terbagi dalam dua jenis, yaitu Program Penunjang dan Program Urusan Bidang Kesehatan. Secara Rinci sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- 4) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 1) Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

- 1) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 2) Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- 3) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

- 4) Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 1) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program dan Kegiatan Penunjang
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Peningkatan Pelayanan BLUD

Secara rinci rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang seperti pada tabel 3.4 (T-C.33) di bawah ini:

Tabel 3.4 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Ketapang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				257,500,000,000.00				331,514,975,498.88
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				257,500,000,000.00				331,514,975,498.88
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				139,401,819,851.00				165,821,140,483.77
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	95 persen	1,550,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		100 persen	2,000,000,000.00
1 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	8 dokumen	650,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		8 dokumen	800,000,000.00
1 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	150,000,000.00	DAU		1 dokumen	200,000,000.00
1 02 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	100,000,000.00	DAU		1 dokumen	150,000,000.00
1 02 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	100,000,000.00	DAU		1 dokumen	150,000,000.00
1 02 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	1 dokumen	100,000,000.00	DAU		1 dokumen	150,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	6 laporan	350,000,000.00	DAU		6 laporan	400,000,000.00
1 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	1 laporan	100,000,000.00	DAU		1 laporan	150,000,000.00
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	100 persen	110,277,735,936.00	DAU		100 persen	127,597,877,930.00
1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	- orang / bulan	109,957,735,936.00	DAU		- orang / bulan	127,147,877,930.00
1 02 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan	- dokumen	50,000,000.00	DAU		- dokumen	75,000,000.00
1 02 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Kesehatan	- dokumen	35,000,000.00	DAU		- dokumen	50,000,000.00
1 02 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	- laporan	75,000,000.00	DAU		- laporan	100,000,000.00
1 02 01 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dinas Kesehatan	- dokumen	35,000,000.00	DAU		- dokumen	50,000,000.00
1 02 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Dinas Kesehatan	- laporan	75,000,000.00	DAU		- laporan	100,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Kesehatan	- dokumen	50,000,000.00	DAU		- dokumen	75,000,000.00
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Dinas Kesehatan	95 persen	975,000,000.00	DAU		100 persen	1,258,000,000.00
1 02 01 2.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Kesehatan	1 unit	50,000,000.00	DAU		2 unit	70,000,000.00
1 02 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Kesehatan	1 paket	100,000,000.00	DAU		1 paket	120,000,000.00
1 02 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	1 dokumen	50,000,000.00	DAU		2 dokumen	70,000,000.00
1 02 01 2.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	20 dokumen	100,000,000.00	DAU		30 dokumen	150,000,000.00
1 02 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Kesehatan	20 dokumen	100,000,000.00	DAU		30 dokumen	150,000,000.00
1 02 01 2.05 0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	20 orang	50,000,000.00	DAU		24 orang	70,000,000.00
1 02 01 2.05 0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	20 laporan	50,000,000.00	DAU		24 laporan	70,000,000.00
1 02 01 2.05 0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	25 orang	50,000,000.00	DAU		35 orang	70,000,000.00
1 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kesehatan	10 orang	150,000,000.00	DAU		12 orang	170,000,000.00
1 02 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	30 orang	120,000,000.00	DAU		35 orang	150,000,000.00
1 02 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	30 orang	155,000,000.00	DAU		35 orang	168,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	95 persen	1,308,200,000.00	DAU		100 persen	1,534,344,000.00
1 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 paket	100,000,000.00	DAU		1 paket	150,000,000.00
1 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 paket	100,000,000.00	DAU		1 paket	150,000,000.00
1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 paket	133,100,000.00	DAU		1 paket	146,140,000.00
1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 paket	99,285,000.00	DAU		1 paket	109,807,500.00
1 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	12 dokumen	19,965,000.00	DAU		12 dokumen	21,961,500.00
1 02 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 paket	60,000,000.00	DAU		1 paket	72,000,000.00
1 02 01 2.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan	15 laporan	150,000,000.00	DAU		20 laporan	160,000,000.00
1 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	30 laporan	465,850,000.00	DAU		35 laporan	512,435,000.00
1 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Kesehatan	4 dokumen	80,000,000.00	DAU		5 dokumen	82,000,000.00
1 02 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Kesehatan	5 dokumen	100,000,000.00	DAU		5 dokumen	130,000,000.00
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Dinas Kesehatan	95 persen	1,400,000,000.00	DAU		100 persen	3,250,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 unit	500,000,000.00	DAU		1 unit	1,500,000,000.00
1 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 unit	700,000,000.00	DAU		1 unit	1,500,000,000.00
1 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1 paket	200,000,000.00	DAU		1 paket	250,000,000.00
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Dinas Kesehatan	95 persen	1,735,562,232.00	DAU		100 persen	5,113,618,455.00
1 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	2 laporan	55,000,000.00	DAU		2 laporan	75,000,000.00
1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 laporan	1,200,000,000.00	DAU		1 laporan	1,500,000,000.00
1 02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	12 laporan	100,000,000.00	DAU		12 laporan	150,000,000.00
1 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	12 laporan	380,562,232.00	DAU		12 laporan	3,388,618,455.00
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	95 persen	1,203,630,000.00	DAU		100 persen	2,020,439,250.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	165 unit	133,100,000.00	DAU		170 unit	146,410,000.00
1 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	33 unit	106,480,000.00	DAU		35 unit	117,128,000.00
1 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	5 unit	964,050,000.00	DAU & DAK FISIK		2 unit	1,756,901,250.00
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD yang terpenuhi	24 Puskesmas	95 persen	20,951,691,683.00	DAU		100 persen	23,046,860,848.77
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	24 Puskesmas	24 unit kerja	20,951,691,683.00	DAU		24 unit kerja	23,046,860,848.77
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				88,254,402,458.00				130,251,505,755.11
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi	Kabupaten Ketapang	100 persen	51,119,684,458.00	DAU & DAK FISIK		100 persen	73,251,207,255.11
1 02 02 2.01 0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	- Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kecamatan Tumbang Titi	1 unit	8,791,000,000.00	DAU & DAK FISIK		1 unit	11,112,025,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.01 0002	Pembangunan Puskesmas	- Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Simpang Hulu, Kecamatan Manis Mata	15 unit	11,610,541,818.00	DAU & DAK FISIK		15 unit	9,522,805,362.77
1 02 02 2.01 0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 unit	1,114,050,000.00	DAU & DAK FISIK		1 unit	1,756,901,250.00
1 02 02 2.01 0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	- Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya	3 unit	1,961,853,332.00	DAU & DAK FISIK		3 unit	3,035,899,666.67
1 02 02 2.01 0006	Pengembangan Puskesmas	- Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana,Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Puskesmas beserta jaringannya	22 unit	4,591,800,000.00	DAU & DAK FISIK		22 unit	4,214,595,000.34
1 02 02 2.01 0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Puskesmas beserta jaringannya	24 unit	4,923,772,642.00	DAU & DAK FISIK		20 unit	2,729,062,500.00
1 02 02 2.01 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	- Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Puskesmas beserta jaringannya	57 unit	5,470,000,000.00	DAU & DAK FISIK		57 unit	4,612,500,000.00
1 02 02 2.01 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	13 unit	2,080,000,000.00	DAU & DAK FISIK		15 unit	1,845,000,000.00
1 02 02 2.01 0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya	7 unit	1,000,000,000.00	DAU & DAK FISIK		7 unit	1,025,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	- paket	1,000,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		- paket	1,300,000,000.00
1 02 02 2.01 0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	- Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	14 Puskesmas	- unit	750,000,000.00	DAU & DAK FISIK		- unit	800,000,000.00
1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	24 Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan	170 unit	410,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		260 unit	595,000,000.00
1 02 02 2.01 0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	RS Pratama Kecamatan Sandai	1 unit	1,116,666,666.00	DAU & DAK FISIK		1 unit	1,144,583,333.33
1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	- Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Dinas Kesehatan	15 paket	6,000,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		20 paket	7,800,000,000.00
1 02 02 2.01 0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	24 Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 paket	300,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		1 paket	390,000,000.00
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	100 persen	30,204,218,000.00	DAU & DAK NON FISIK		100 persen	37,335,661,000.00
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	12.383 orang	1,500,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		13.002 orang	1,545,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	- Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	11.818 Ibu Bersalin	700,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		12.408 Ibu Bersalin	721,000,000.00
1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	- Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	11.256 Orang	800,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		11.818 Orang	824,000,000.00
1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	- Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	40.390 balita	700,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		42.409 balita	721,000,000.00
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	- Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	98.912 orang	1,000,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		103.857 orang	1,030,000,000.00
1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	- Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	8.000 orang	200,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		8.000 orang	200,000,000.00
1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	- Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	49.636 orang	700,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		52.117 orang	721,000,000.00
1 02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	- Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2.000 orang	200,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		2.000 orang	200,000,000.00
1 02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	- Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2.000 orang	175,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		2.000 orang	175,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2.000 orang	300,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		2.000 orang	300,000,000.00
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	- Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	- orang	1,200,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK	Termasuk BMHP	- orang	1,400,000,000.00
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	- Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	- orang	600,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK	Termasuk BMHP	- orang	615,000,000.00
1 02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kabupaten Ketapang	1 dokumen	150,000,000.00	DAU		1 dokumen	250,000,000.00
1 02 02 2.02 0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kabupaten Ketapang	1 dokumen	125,000,000.00	DAU		1 dokumen	175,000,000.00
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	75,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		1 dokumen	25,000,000.00
1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	150,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		1 dokumen	150,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	175,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		1 dokumen	175,000,000.00
1 02 02 2.02 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	1 dokumen	250,000,000.00	DAU		1 dokumen	150,000,000.00
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	4 dokumen	350,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		4 dokumen	350,000,000.00
1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	- Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	100 orang	175,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		100 orang	175,000,000.00
1 02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	- Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	100 orang	100,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		100 orang	100,000,000.00
1 02 02 2.02 0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kabupaten Ketapang	1 dokumen	600,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		1 dokumen	990,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	- dokumen	1,300,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK	Termasuk BMHP dan kebutuhan VAR (SAR)	- dokumen	1,640,000,000.00
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Ketapang	36 dokumen	13,300,000,000.00	DAU		36 dokumen	17,000,000,000.00
1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Dinas Kesehatan dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	- paket	170,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		- paket	170,000,000.00
1 02 02 2.02 0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Kabupaten Ketapang	9 unit	75,000,000.00	DAU & DAK FISIK		12 unit	125,000,000.00
1 02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kabupaten Ketapang	1 dokumen	450,000,000.00	DAU		4 dokumen	650,000,000.00
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas beserta jaringannya	1 dokumen	300,000,000.00	DAU		- dokumen	350,000,000.00
1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	- dokumen	1,184,218,000.00	DAU		- dokumen	1,149,161,000.00
1 02 02 2.02 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	2 Klinik Pratama dan 6 Puskesmas	- unit	1,150,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		- unit	1,675,000,000.00
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 laporan	100,000,000.00	DAU		1 laporan	100,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.02 0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	300,000,000.00	DAU		1 dokumen	306,000,000.00
1 02 02 2.02 0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	- Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kabupaten Ketapang	1 unit	350,000,000.00	DAU		1 unit	550,000,000.00
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	- Angka keberhasilan pengobatan (sucsess rate TB)	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	90	600,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK	Termasuk obat back up	90	615,000,000.00
1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	- Cakupan ODHIP on ART	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	50	350,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		60	358,750,000.00
1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	- Jumlah Puskesmas melaksanakan Surveilans Vektor	Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas	24	350,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		24	358,750,000.00
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terlaksana	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	100 persen	6,240,000,000.00	DAU		100 persen	18,720,000,000.00
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 dokumen	6,240,000,000.00	DAU		1 dokumen	9,360,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin RS Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota yang terlaksana	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	100 persen	690,500,000.00	DAU		100 persen	944,637,500.00
1 02 02 2.04 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	- Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kabupaten Ketapang	4 unit	75,000,000.00	DAU		4 unit	150,000,000.00
1 02 02 2.04 0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kabupaten Ketapang	4 unit	50,000,000.00	DAU		4 unit	75,000,000.00
1 02 02 2.04 0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	24 Puskesmas	26 unit	465,500,000.00	DAU		26 unit	569,637,500.00
1 02 02 2.04 0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	- Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	24 dokumen	100,000,000.00	DAU		24 dokumen	150,000,000.00
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				27,513,435,691.00				31,268,029,260.00
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota yang terlaksana	3 Rumah Sakit dan 24 Puskesmas	90 persen	490,000,000.00	DAU		90 persen	502,250,000.00
1 02 03 2.01 0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian PerizinanPraktik Tenaga Kesehatan	3 Rumah Sakit dan 24 Puskesmas	- dokumen	450,000,000.00	DAU		- dokumen	461,250,000.00
1 02 03 2.01 0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta TindakLanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3 Rumah Sakit dan 24 Puskesmas	- dokumen	40,000,000.00	DAU		- dokumen	41,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota yang terpenuhi	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	85 persen	26,523,435,691.00	DAU		90 persen	30,253,279,260.00
1 02 03 2.02 0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber DayaManusia Kesehatan	Dinas Kesehatan, 1 Rumah Sakit dan 24 Puskesmas	1 dokumen	100,000,000.00	DAU		1 dokumen	102,500,000.00
1 02 03 2.02 0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yangMemenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1.037 orang	26,223,435,691.00	DAU		1.061 orang	29,945,779,260.00
1 02 03 2.02 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan, 1 Rumah Sakit dan 24 Puskesmas	- dokumen	200,000,000.00	DAU		- dokumen	205,000,000.00
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Dinas Kesehatan, 1 Rumah Sakit dan 24 Puskesmas	85 persen	500,000,000.00	DAU		90 persen	512,500,000.00
1 02 03 2.03 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Dinas Kesehatan, 1 Rumah Sakit dan 24 Puskesmas	250 orang	500,000,000.00	DAU		250 orang	512,500,000.00
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				1,420,000,000.00				3,430,000,000.00
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang terlaksana	Sarana Kefarmasian Kabupaten Ketapang	95 persen	420,000,000.00	DAU		100 persen	1,090,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 04 2.01 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana Kefarmasian Kabupaten Ketapang	1 dokumen	420,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		1 dokumen	545,000,000.00
1 02 04 2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapat Sertifikat Produksi	Sarana Kefarmasian Kabupaten Ketapang	95 persen	400,000,000.00	DAU		100 persen	1,040,000,000.00
1 02 04 2.02 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	- Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Sarana Kefarmasian Kabupaten Ketapang	1 dokumen	400,000,000.00	DAU		1 dokumen	520,000,000.00
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang terpenuhi	Sarana IRTP Kabupaten Ketapang	95 persen	200,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		100 persen	260,000,000.00
1 02 04 2.03 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sarana IRTP Kabupaten Ketapang	1 dokumen	200,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		1 dokumen	260,000,000.00
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang terpenuhi	Dinas Kesehatan, Produk dan Sarana IRTP Kabupaten Ketapang	95 persen	400,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		100 persen	1,040,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 04 2.06 0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	- Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Produk dan Sarana IRTP Kabupaten Ketapang	- unit	400,000,000.00	DAU & DAK NON FISIK		- unit	520,000,000.00
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				910,342,000.00				744,300,000.00
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kesehatan masyarakat	Kabupaten Ketapang	75 persen	506,042,000.00	DAU & DAK NON FISIK		80 persen	426,000,000.00
1 02 05 2.01 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Ketapang	- dokumen	506,042,000.00	DAU & DAK NON FISIK		- dokumen	426,000,000.00
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Promotif Preventif dalam rangka pelaksanaan sehat TK Daerah Kab/Kota yang terlaksana	Kabupaten Ketapang dan 24 Puskesmas	75 persen	225,650,000.00	DAU		80 persen	175,650,000.00
1 02 05 2.02 0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kabupaten Ketapang dan 24 Puskesmas	- dokumen	225,650,000.00	DAU		- dokumen	175,650,000.00
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Posyandu dan 24 UKBM	75 persen	178,650,000.00	DAU		80 persen	142,650,000.00
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Posyandu dan 24 UKBM	- dokumen	178,650,000.00	DAU		- dokumen	142,650,000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Kesehatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kesehatan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten Ketapang, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

BAB V PENUTUP

- A. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan sebagai implementasi dari Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2021-2026.
- B. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, serta mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, efisien, serta transparan dan akuntabel.
- C. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.
- D. Pada akhir tahun anggaran akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Ketapang, September 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Ketapang



PERIA KOWIRA, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19730507 200212 2 005